



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

Jl. Pahlawan No. 138 Kebumen 54311 Telp. (0287) 381051

PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR:050/824.1/KEP/2017

TENTANG

RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018;
- b. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018

Pasal 1

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.

Pasal 2

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 19 Juni 2017

KEPALA BPKAD
KABUPATEN KEBUMEN

DYAH WORO PALUPI

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kebumen;
2. Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen
4. Inspektur Kabupaten Kebumen.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen dibentuk berdasarkan Peraturan daerah nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya untuk memanfaatkan potensi yang tersedia, mencari solusi permasalahan yang ada serta berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mewujudkan kondisi kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh satu Sekretaris dengan dua Kepala Sub Bagian, tiga Kepala Bidang dengan delapan Kasubbid sebagai berikut:

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Anggaran, membawahi:
 1. Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Bidang Belanja, membawahi:
 1. Subbidang Belanja Tidak Langsung;
 2. Subbidang Belanja Langsung;
 3. Subbidang Perbendaharaan;
- e. Bidang Aset dan Akuntansi, membawahi:
 1. Subbidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan;
 2. Subbidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemindahtanganan;
 3. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan

- f. Unit Pelaksana Teknis Badan (jika ada);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

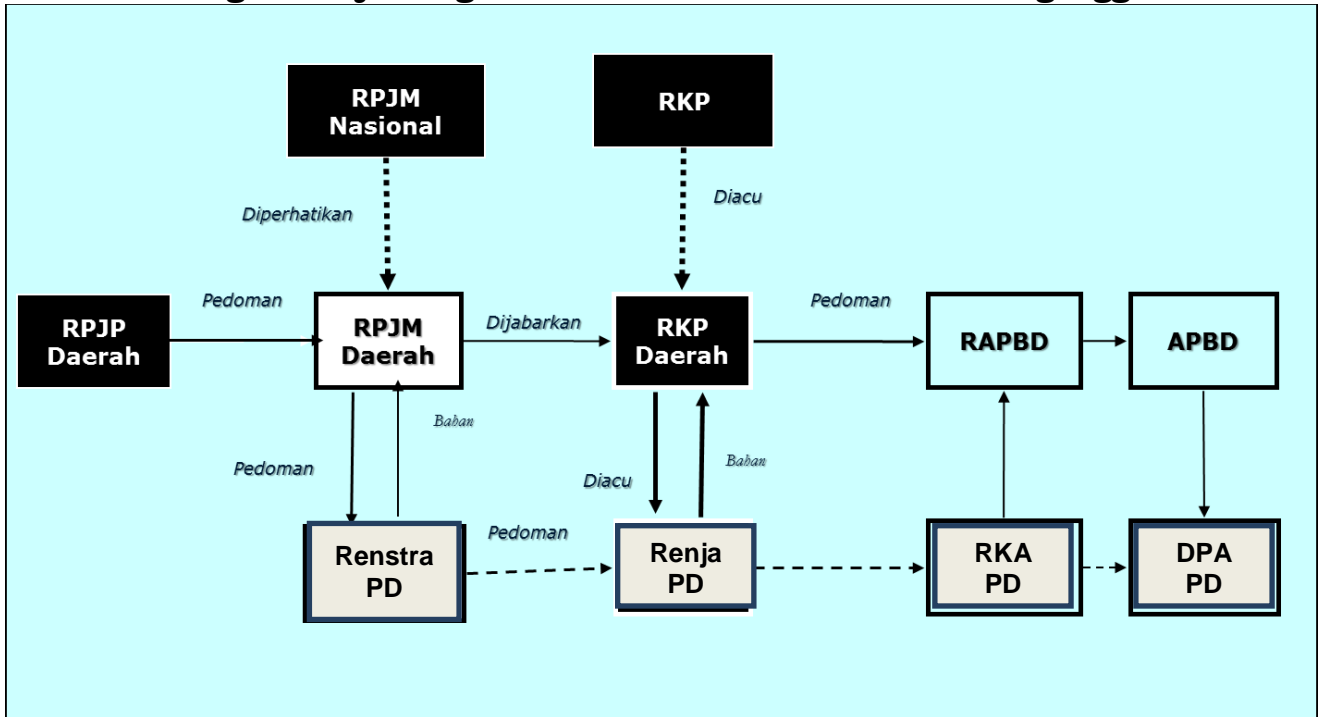
Selanjutnya perencanaan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan suatu wilayah, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik.

Cakupan perencanaan pembangunan nasional harus memperhatikan terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Perencanaan yang disusun dari tingkat pusat sampai daerah memiliki beberapa jenjang di antaranya rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, untuk menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 1 tahun, dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan pemerintah di atasnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Gambar 1
Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 (diolah)

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja Perangkat Daerah. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta persiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan

awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip-prinsip dalam penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 antara lain :

1. Substansi Renja Perangkat Daerah merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen resmi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholder*) di daerah sangat dibutuhkan dalam mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini untuk menjamin kesesuaian dokumen perencanaan dengan kebutuhan seluruh *stakeholders*. Oleh karena itu, Perangkat Daerah sebagai salah satu *stakeholder* kunci di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana, melalui penyusunan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah, yang kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja tahunan Perangkat Daerah. Hal ini mengacu pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen melakukan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018.

A. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018, landasan hukum yang digunakan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten, Kota, dan Kecamatan.

- tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional;
 16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Perundang – Undangan;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004

- tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 dimaksudkan untuk dan menyelaraskan prioritas program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu, penyusunan Rencana Kerja ini juga dimaksudkan untuk melakukan upaya sinkronisasi terhadap program-program dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pembangunan daerah pada tahun 2018. Hal ini untuk lebih meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan media untuk menyamakan persepsi, menyatukan komitmen dan langkah-langkah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen pada Tahun 2018.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 ini adalah untuk mengidentifikasi efektivitas berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi rencana kerja sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain hal tersebut, hasil/keluaran penyusunan rencana kerja ini menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2018. Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun ke depan merupakan penjabaran dari prioritas tujuan. Dalam upaya mencapai tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perlu ditetapkan program tahunan, sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 ini.

C. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menguraikan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan, keterkaitan antara Renja dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja.

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi Renja.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BPKAD TAHUN 2016

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 dan capaian Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016-2021

Subbab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun $n-2$) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun $n-1$), mengacu pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

B. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan

tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

C. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Menguraikan tentang isu-isu baik eksternal maupun internal yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

D. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018

Sub-bab ini memuat uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan hasil analisis kebutuhan.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Berisi penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten Kebumen.

C. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

BAB IV. PENUTUP

A. Kaidah Transisi

Menguraikan tentang catatan-catatan dalam penyusunan Renja.

B. Kaidah Pelaksanaan

Menguraikan kaidah-kaidah yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan Renja.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2016

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 dan Capaian Renstra Tahun 2016-2021

Berdasarkan Perda SOTK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Laksana, bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terpisah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen. Oleh karena itu dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih mengacu yang telah dituangkan dalam Renja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2016 menunjukkan hasil yang cukup baik karena hampir semua target yang telah ditetapkan dapat dicapai seratus persen (92,90%) dari 42 (empat puluh dua) kegiatan sesuai yang telah direncanakan.

Kegiatan review hasil pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2016 ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Evaluasi kinerja ditentukan oleh hasil manfaat input dan output Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2016. Input dalam pengertian ini terbatas pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan output, sedangkan sumber daya manusia dan bahan baku tidak dimasukkan dalam evaluasi ini. Sedangkan *output* adalah hasil fisik dari suatu kegiatan. *Outcome* atau indikator hasil tidak dianalisis pada evaluasi ini, mengingat diperlukan periode yang lebih lama untuk dapat melihat efektifitas kegiatan.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selama tahun 2016 dan perkiraan target tahun 2017.

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2016

Pencapaian kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen diukur dari realisasi anggaran yang telah disepakati dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016.

Secara umum dari anggaran belanja yang ditargetkan sebesar Rp.28.082.770.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.26.457.922.434,00 atau 94,21 persen. Dari realisasi belanja tersebut, sebesar Rp 10.450.550.000,00 atau 96,42 persen dianggarkan untuk memenuhi kebutuhan Belanja Tidak Langsung dan Rp 17.632.220.000,00 atau 92,90 persen dianggarkan untuk memenuhi kebutuhan Belanja Langsung.

Tabel 2.1
Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kebumen Per 31 Desember 2016

Nomor	Program/Kegiatan	Anggaran 2016	Realisasi 2016		Fisik (%)
		(Rp)	(Rp)	%	
	Belanja Tidak Langsung	10.450.550.000	10.076.714.408	96.42	96.42
	Gaji dan Tunjangan Lainnya	6.748.670.000	6,516,202,662	96.56	96.56
	Tambahan Penghasilan PNS	767.280.000	670,582,500	87.40	87.40
	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.671.600.000	1,650,105,588	98.71	98.71
	Insentif Pemungutan Pajak Daerah – PBB Perdesaan dan Perkotaan	1.250.000.000	1,239,823,658	99.19	99.19
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	13.000.000	0	-	-
	Belanja Langsung	17.632.220.000	16.381.208.026	92,90	89,41
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1.	Penyediaan Jasa Surat	6,000,000	4,344,710	72.41	72.41

Nomor	Program/Kegiatan	Anggaran 2016	Realisasi 2016		Fisik (%)
		(Rp)	(Rp)	%	
	menyurat				
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	334,000,000	258,455,724	77.38	77.38
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	225,500,000	129,639,961	57.49	57.49
4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	272,140,000	258,025,150	94.81	94.81
5.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	13,622,000	13,621,375	100.00	100.00
6.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	50,000,000	43,945,000	87.89	87.89
7.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	82,500,000	79,357,400	96.19	96.19
8.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	82,500,000	82,494,290	99.99	99.99
9.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18,520,000	18,507,000	99.93	99.93
10.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20,000,000	10,107,000	50.54	50.54
11.	Penyediaan Makanan dan minum	130,000,000	125,907,350	96.85	96.85
12.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	145,000,000	139,448,990	96.17	96.17
13.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	15,000,000	10,480,000	69.87	69.87
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana				
14.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	5,247,000,000	5,111,185,500	97.41	97.41
15.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	837,000,000	698,953,381	83.51	83.51
16.	Pengadaan Mebeleur	90,000,000	86,080,000	95.64	95.64
17.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	665,000,000	631,070,700	94.90	94.90
18.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	429,125,000	370,797,266	86.41	86.41
19.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	10,500,000	10,500,000	100.00	100.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
20.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	125,000,000	45,780,600	36.62	36.62
	Program				

Nomor	Program/Kegiatan	Anggaran 2016	Realisasi 2016		Fisik (%)
		(Rp)	(Rp)	%	
	Pengembangan Data/Informasi				
21.	Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	21,000,000	18,311,500	87.20	87.20
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				
22.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	127,750,000	117,479,104	91.96	91.96
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				
23.	Penyusunan Standar Satuan Harga	98,955,000	89,357,627	90.30	90.30
24.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	381,105,000	360,722,649	94.65	94.65
25.	Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	285,000,000	269,306,586	94.49	94.49
26.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	266,500,000	259,517,044	97.38	97.38
27.	Pemutakhiran dan pemeliharaan basis data obyek PBB	199,000,000	194,894,450	97.94	97.94
28.	Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	210,000,000	184,300,779	87.76	87.76
29.	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	524,295,000	500,212,416	95.41	95.41
30.	Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah	305,000,000	289,231,949	94.83	94.83
31.	Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Keuangan Daerah	573,000,000	559,942,242	97.72	97.72
32.	Pengelolaan Gaji PNSD	335,000,000	331,873,238	99.07	99.07
33.	Penyusunan KUAPBD dan PPAS	160,000,000	157,903,450	98.69	98.69
34.	Intensifikasi & Ekstensifikasi Pajak Daerah	472,500,000	439,309,482	92.98	92.98
35.	Intensifikasi & Ekstensifikasi PBB dan BPHTB	3,311,458,000	3,059,186,405	92.38	92.38
36.	Intensifikasi & Ekstensifikasi Pendapatan lain-lain	105,000,000	100,549,367	95.76	95.76

Nomor	Program/Kegiatan	Anggaran 2016	Realisasi 2016		Fisik (%)
		(Rp)	(Rp)	%	
	daerah				
37.	Pendataan Obyek dan Subyek PBB pola Sismiop	220,000,000	213,271,888	96.94	96.94
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota				
38.	Fasilitasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	660,000,000	571,774,892	86.63	86.63
39.	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah	231,750,000	208,927,880	90.15	90.15
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				
40.	Rekonsiliasi Kas Daerah	216,500,000	208,063,531	96.10	96.10
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik				
41.	Penyusunan dan Pengumpulan data dan statistik daerah	25,000,000	23,046,000	92.18	92.18
	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan				
42.	Penunjang Bantuan Keuangan atau bantuan sosial	105,000,000	95,324,150	90.78	90.78
Jumlah		28.082.770.000	26.457.922.434	94,21	92,92

Sumber: LAKIP DPPKAD Tahun 2016

Secara umum dari hasil penilaian sendiri atas pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2015, maka pada tahun 2016 DPPKAD Kabupaten Kebumen melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 25.619.617.000,00 melalui mekanisme perubahan APBD 2016 menjadi Rp. 28.082.770.000,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp.10.450.550.000,00 dan Belanja Langsung Rp.17.632.220.000,00. Adapun realisasi anggaran sampai dengan bulan Desember 2016 sebesar Rp. 26.457.922.434 (94,21%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp.10.076.714.408 (96,42%) dan belanja langsung sebesar Rp.16.381.208.026 (92,90%).

Realisasi Anggaran 94,21% diatas realisasi Belanja Kabupaten Kebumen yang sebesar 89 %, namun demikian di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah masih ada

kegiatan yang pencapaiannya dibawah 80% yaitu 5 kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan 1 kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, masing-masing dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Realisasi 72,41% disebabkan pengiriman surat banyak yang menggunakan email;
- 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik realisasi 77,38% disebabkan adanya penghematan energi listrik, air dan telepon;
- 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional realisasi 57,49 disebabkan kendaraan dinas/operasional cukup sehat dan baik serta penggunaan BBM yang di efisiensi;
- 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan realisasi 50,54% disebabkan pembelian surat kabar hanya tertentu;
- 5. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah realisasi 69,87 % disebabkan karena tidak banyak undangan rapat-rapat di dalam daerah;
- 6. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan realisasi 36,62 % disebabkan undangan diklat workshop/ pengiriman peserta banyak yang tidak dihadiri karena kebijakan.

Tabel 2.3
Capaian Sasaran Strategis DPPKAD Kabupaten Kebumen Tahun 2016

NO	SASARAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2016	REALISASI
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah		Opini BPK atas LKPD	WTP	WDP
1		Meningkatnya layanan kinerja perangkat daerah	Prosentase capaian kinerja pelayanan SKPD	91 %	91%

2		Meningkatnya pengelolaan keuangan berupa anggaran belanja daerah, pendapatan dan aset daerah dan dokumen keuangan daerah	Capaian peningkatan pengelolaan keuangan dan aset	92 %	92%
---	--	--	---	------	-----

Sumber : LAKIP DPPKAD Tahun 2016

Bahwa target 2016 opini BPK atas LKPD adalah WTP. Namun setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, BPK memberikan pendapatan Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut :

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Dengan Pengecualian”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016.

2. Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah Kabupaten Kebumen menyajikan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 99,18 miliar, belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp. 160,88 miliar dan Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 360,61 miliar. Realisasi belanja modal tersebut dilaksanakan antara lain melalui mekanisme pengadaan langsung berdasarkan usulan kegiatan yang bersumber dari pokok-pokok pikiran DPRD. Pemeriksaan secara uji petik atas paket pekerjaan usulan pokok-pokok pikiran DPRD senilai Rp.

21,50 miliar menunjukkan adanya indikasi kelemahan Sistem Pengendalian Intern terkait integritas dari penyelenggara pemerintahan daerah yang antara lain ditandai dengan ; (i) Permintaan pokok-pokok pikiran DPRD menyimpang dari ketentuan karena disampaikan setelah RKPD ditetapkan Bupati; (ii) terdapat indikasi pengaturan pengadaan langsung sehingga Pemerintah Daerah berpotensi tidak mendapatkan harga yang kompetitif; (iii) Peneyedia barang/jasa mempunyai hubungan kekeluargaan dengan anggota DPRD pengusul pokok-pokok pikiran; (iv) kekurangan volume atas beberapa paket pekerjaan; (v) pemahalan harga atas beberapa paket pekerjaan; (vi) tidak sesuai spesifikasi teknis pada beberapa paket pekerjaan; dan (vii) pemberian imbalan (kisk back) dari penyedia barang/jasa kepada anggota DPRD pengusul pokok-pokok pikiran rata-rata sebesar 5 – 10% dari nilai kontrak. BPK tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan secara memadai untuk dapat meyakini kewajaran nilai realisasi belanja modal dan aset tetap hasil pengadaan barang/jasa tersebut.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan agar:

- a. Ketua DPRD Kebumen memerintahkan Badan Anggaran dan seluruh Komisi agar dalam mengusulkan kegiatan pokok-pokok pikiran berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- b. Bupati Kebumen memerintahkan TAPD dalam melakukan pembahasan pokok-pokok pikiran mempedomani ketentuan yang berlaku;
- c. Bupati Kebumen memerintahkan para Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan PPK mempedomani ketentuan terkait dengan pengadaan barang dan jasa.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain kekurangan volume pada enam SKPD sebesar Rp.317,46 juta, kelebihan pembayaran harga satuan timpang di DPU sebesar Rp.253,62 juta dan ketekoran kas pada SKPD sebesar Rp.63,07 juta.

Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati antara lain agar :

- a. Memerintahkan para Kepala OPD terkait untuk memberikan sanksi kepada PPK dan PPTK atas ketidakcermatannya dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan;
- b. Memerintahkan para Kepala OPD terkait untuk memberikan sanksi kepada PPHP atas ketidakcermatannya dalam memeriksa kesesuaian fisik hasil pekerjaan dengan kontrak; dan
- c. Memerintahkan Kepala Dinkes, Kepala Disdik, Kepala Disporawisata dan Camat Pejagoan untuk memberikan sanksi kepada bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara penerimaan Obyek Wisata Pantai Suwuk atas kelalaiannya sehingga terjadi ketekoran kas.

Tabel 2.3
Capaian Sasaran Strategis DPPKAD Kabupaten Kebumen Tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%	Interval (%)				Predikat
						< 55	55-70	71-85	86-100	
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	1.	Opini BPK atas LKPD	WTP	WDP	-					Tidak Berhasil / tidak tercapai
Meningkatnya layanan kinerja perangkat daerah	2.	Prosentase capaian kinerja pelayanan SKPD	100%	94,66%	100				√	Sangat Berhasil
Meningkatnya pengelolaan keuangan berupa anggaran belanja daerah, pendapatan dan aset daerah dan dokumen keuangan daerah	3.	Capaian peningkatan pengelolaan keuangan dan aset	100%	94,66%	100				√	Sangat Berhasil

Sumber : LAKIP DPPKAD Tahun 2016

Rekapitulasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen sampai dengan tahun 2016, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sampai Dengan Tahun 2016 dan Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian Kinerja RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja	Keterangan/ Evaluasi Tahun pertama RPJMD
	Indikator Kinerja Utama BPKAD				
1	Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (%)	91%	95%		
2	Capaian Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	WTP	WTP	100%	
	Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah				
1	Capaian peningkatan pengelolaan keuangan dan asset	92,12%	95%	100%	

*Angka Sementara / Proyeksi

Tabel 2.5
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Strategis
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016-2021

Kode	Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD TAHUN 2016-2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEG.SKPD (TAHUN LALU/n-2)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RENJA SKPD TH BERJALAN 2017	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2017 (TAHUN BERJALAN)	
					TARGET 2017	REALISASI 2017	TINGKAT REALISASI %		realisasi capaian	tingkat capaian %
	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
	WAJIB									
	Jumlah Prosentase capaian seluruh program/jumlah program	Prosentase capaian kinerja pelayanan SKPD	96					91	91	100%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	15					20	20	100%
	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkelolanya surat menyurat	72		12	12	100	12	33,33	33,33

				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening telekomunikasi, air dan listrik (bulan)	72		12	12	100	12	33,33	100%
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas/operasional (unit mobil dan motor)	72		12	12	100	12	33,33	100%
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya jasa pengelola kegiatan (orang bulan)	72		12	12	100	12	33,33	100%
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor (bulan)	72		12	12	100	12	33,33	100%
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Perbaikan peralatan kerja	72		12	12	100	12	33,33	100%
				Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor (bulan)	72		12	12	100	12	33,33	100%
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan penggandaan, cetak, jilid (bulan)	72		12	12	100	12	33,33	100%
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bulan)	72		12	12	100	12	33,33	100%
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (bulan)	72		12	12	100	12	33,33	100%
				Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya jamuan rapat dan jamuan tamu (bulan)	72		12	12	100	12	33,33	100%

			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya akomodasi dan perjalanan dinas luar daerah (bulan)	72		12	12	100	12	33,33	100%
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya akomodasi dan perjalanan dinas ke dalam daerah (bulan)	72		12	12	100	12	33,33	100%
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	bertambahnya jumlah sarana dan prasarana kantor yang memadai	683					28	28	100%
			Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Pengadaan paket kendaraan dinas/operasional	22		9	9	100	14	14	100%
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan paket perlengkapan kantor berupa:								
				gorden (m)	289 mtr/Vi trage					324	324	100%
				AC (unit)	4					2	2	100%
				Genset	1 unit 80 KVA							
				jaringan listrik (paket)	1 paket					1	1	100%
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan paket peralatan gedung kantor berupa :								
				Laptop	2					-	-	
				Komputer	14					10	10	100%
				Sound System	1					4	4	100%
				LCD	2					1	1	100%
				UPS	6					1	1	
				Printer	12					10	10	100%
				CCTV	1 paket					-	-	

					Camera	1						
					Destometer	2 buah						
				Pengadaan mebeleur	Pengadaan paket peralatan mebeleur berupa :							
					Lemari Besi	1				15	15	100%
					Meja Rapat	12				12	12	100%
					Meja Kerja	3						
					Kursi Rapat	39				4	4	100%
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1		1	1	100	1	100%
				Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya meubeleur (unit)	550		5	5	100	35	100%
				Program pengembangan data/informasi	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan pada perangkat daerah	5				5	5	100%
				Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya Renja, , RKA, DPA, LKPJ/LPPD, Lakip	5		5	5	100	5	100%

				Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Tersedianya dokumen database perangkat daerah	1					1	1	100%
				Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah	Tersusunnya data base pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah	1		1	1	100	1	1	100%
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya	85					10	10	100%
				Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Pengiriman aparatur untuk Bintek, workshoop dan seminar terkait pengelolaan keuangan daerah	85		5	5	100	10	10	100%
				Opini Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Tidak berpendapat (disclaimer) = 2, Wajar Dengan Pengecualian = 3, Wajar Tanpa Pengecualian = 4	Opini BPK atas LKPD	4					4	4	100%
				Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Capaian Realisasi belanja	90					90	90	100%

					Capaian Penerbitan Dokumen keuangan daerah tepat waktu	100					100	100	100%
					Capaian SKPD Tertib Administrasi AsetTepat Waktu	83					79	79	100%
				Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Keuangan Daerah	Tersedianya data penatausahaan keuangan daerah	1		1	1	100	1	1	100%
					Pembinaan bendahara SKPD	180		180	180	100	216	216	100%
				Pengelolaan Gaji PNSD	Pengelolaan gaji PNSD dan rekonsiliasi jumlah pegawai	14,060		14,060	14,060	100	14,052	14,052	100%
					Lancarnya pengelola belanja hibah , bagi hasil, bantuan keuangan dan bantuan sosial	1		1	1	100	1	1	100%
				Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersedianya rancangan perda APBD dan perbub APBD	2		2	2	100	2	2	100%
				Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Tersedianya rancangan perda PAPBD dan perbup PAPBD	2		2	2	100	2	2	100%
				Penyusunan KUAPBD dan PPAS	Tersusunnya KUAPBD dan PPAS murni dan perubahan	2		2	2	100	2	2	100%

				Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya raperda tentang APBD	3		3	3	100	3	3	100%
				Penyusunan standar satuan harga	Tersusunnya peraturan bupati tentang indeks standarisasi harga	1		1	1	100	1	1	100%
				Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Rekonsiliasi administrasi keuangan dengan SKPD/petugas akuntansi	12		12	12	100	12	12	100%
				Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Tersedianya pengolahan data barang milik daerah dan penilaian aset	2		2	2	100	2	2	100%
				Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah	Fasilitasi pengaman aset berupa :								100%
					Pengadaan papan nama aset daerah	50		20	20	100	50	50	100%
					Terbayarnya asuransi kendaraan dinas roda 4	3		3	3	100	3	3	100%
					terselesaikanya TPTGR	2		12	12	100	2	2	100%
				Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan lain-lain daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan lain-lain daerah	3		180	180	100	3	3	100%
				Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Jumlah SKPD yang mengirim SPJ fungsional tepat waktu	216					216	216	100%

				Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah	Pengesahan SPJ fungsional SKPD	216		182	182	100	216	216	100%
				Asistensi Penyusunan regulasi pengelolaan keuangan/aset daerah	tersusunnya regulasi pengelolaan keuangan/aset daerah	1							100%
				Penunjang Bantuan keuangan/bantuan sosial	Terlaksananya pencairan bantuan keuangan/bantuan sosial ,hibah,pembiayaan	120		14	14	100	120	120	100%
				Hasil penilaian laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (D = 1, C = 2, CC = 3, B = 4, A = 5, AA = 6)	Nilai akuntabilitas kinerja	B					B	B	100%
				Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Tersedianya data rekonsiliasi pelaporan keuangan daerah	1					1	1	100%
				Rekonsiliasi Kas Daerah	Rekonsiliasi pelaporan	12		12	12	100	12	12	100%

Sumber : Renstra BPKAD Tahun 2016-2021

2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.

Semangat otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintah Pusat yang bersih dan akuntabel serta Pemerintah Daerah yang tumbuh dan berkembang secara mandiri dengan daya saing yang sehat antar daerah sehingga terwujud kesatuan bangsa baik di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, telah diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berupa sistem keuangan berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kebumen, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan fungsinya, dinas mengacu pada visi Kabupaten Kebumen yaitu Menuju Kabupaten Kebumen yang modern, berkepribadian demi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kebumen, diperlukan adanya pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar.

BPKAD Kabupaten Kebumen mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan

bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Kabupaten Kebumen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
- b. penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. pengelolaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- e. penyusunan laporan keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Kebumen tidak terlepas dari berbagai masalah dan hambatan. Permasalahan yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen berkaitan dengan hambatan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima (5) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Dewasa ini, kualitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Kebumen pada umumnya mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah tersebut meliputi :

- a. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana kegiatan dan yang menangani pengelolaan keuangan cukup memadai;
- b. Koordinasi yang baik antara pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan
- c. Adanya komitmen pengelola keuangan sehingga realisasi keuangan kegiatan dapat mencapai target yang telah direncanakan.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen merupakan perkiraan tantangan dan hambatan yang akan mempengaruhi perjalanan pembangunan pada tahun 2018. Isu penting disusun berdasarkan hasil evaluasi Rencana Strategis Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 dan pada tahun 2017 mengacu pada Rencana Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2016 yang sudah dicapai tersebut, masih ada hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk dilaksanakan dalam mencapai RPJMD 2016-2021.

Adapun beberapa permasalahan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, diantaranya :

1. Pelayanan penyerapan dana dapat dilaksanakan dengan baik pada kondisi normal, namun pada kondisi over load pelayanan lebih lama terutama pada akhir tahun anggaran;
2. Pengelolaan keuangan dengan komputerisasi dan sistem Pengelolaan Keuangan daerah sudah dilaksanakan on line oleh 56 Perangkat Daerah dengan dukungan komputer pengelolaan APBD lebih mudah, cepat dan valid;
3. Penelusuran dan sinkronisasi aset telah dilaksanakan mulai Tahun 2009, sampai saat ini sudah mencapai 100 % (seratus persen) Perangkat Daerah namun masih perlu perbaikan agar bisa memperoleh administrasi aset yang akuntabel;
4. Sosialisasi dan persiapan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual sudah dilaksanakan, dan sedang dalam penyempurnaan.

Berdasarkan evaluasi pencapaian kinerja dan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di depan, maka isu-isu strategis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 antara lain sebagai berikut:

1. Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen belum optimal dikarenakan masih kurang tertibnya pencatatan tertib administrasi barang milik daerah;
2. Diterapkannya system akuntansi berbasis akrual yang masih membutuhkan penyempurnaan dalam sistemnya.

Rencana penyelesaian adalah :

1. Hingga saat ini masih dilakukan sinkronisasi asset ke masing-masing Perangkat Daerah agar bisa memperoleh data BMD yang akurat;
2. Sampai saat ini masih berkoordinasi dan berkonsultasi kepada BPKP untuk menyempurnakan system berbasis akrual agar dapat digunakan dengan maksimal, hal itu dilakukan secara bertahap.

3 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kerangka dan langkah awal serta menjadi pedoman dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah sewajarnya apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Melihat dan membandingkan antara kebutuhan dan keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang

dimiliki, perlu dilakukan seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan yang hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Tema pembangunan daerah tahun 2018 adalah “Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pertanian untuk Kesejahteraan Masyarakat”, dengan prioritas pembangunan antara lain :

1. Peningkatan perekonomian berbasis pertanian dan pariwisata
2. Penanggulangan kemiskinan berbasis potensi unggulan wilayah
3. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
4. Peningkatan kehidupan sosial dan keagamaan
5. Peningkatan penerapan *good and clear government*

Adapun review Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel
Review terhadap Rancangan Awal Renca Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018

TABEL 3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
BPKAD KABUPATEN KEBUMEN

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BELANJA LANGSUNG				7,321,639,000	BELANJA LANGSUNG				7,321,639,000	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,839,139,000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,839,139,000	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	BPKAD Kab. Kebumen	Terkelolanya surat menyurat	12 Bulan	5,775,000	Penyediaan jasa surat menyurat	BPKAD Kab. Kebumen	Terkelolanya surat menyurat	12 Bulan	5,775,000	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BPKAD Kab. Kebumen	Terbayarnya rekening telekomunikasi, air dan listrik	12 Bulan	440,000,000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BPKAD Kab. Kebumen	Terbayarnya rekening telekomunikasi, air dan listrik	12 Bulan	440,000,000	

3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	BPKAD Kab. Kebum en	Terawatnya kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	249,150,000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	BPKAD Kab. Kebum en	Terawatnya kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	249,150,000	
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	BPKAD Kab. Kebum en	Terbayarnya jasa pengelola kegiatan	12 Bulan	463,314,000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	BPKAD Kab. Kebum en	Terbayarnya jasa pengelola kegiatan	12 Bulan	463,314,000	
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	BPKAD Kab. Kebum en	Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor	12 Bulan	66,000,000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	BPKAD Kab. Kebum en	Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor	12 Bulan	66,000,000	
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	BPKAD Kab. Kebum en	Perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	85,800,000	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	BPKAD Kab. Kebum en	Perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	85,800,000	
7	Penyediaan alat tulis kantor	BPKAD Kab. Kebum en	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	82,500,000	Penyediaan alat tulis kantor	BPKAD Kab. Kebum en	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	82,500,000	
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BPKAD Kab. Kebum en	Tersedianya kebutuhan penggandaan, cetak, jilid	12 Bulan	82,500,000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BPKAD Kab. Kebum en	Tersedianya kebutuhan penggandaan, cetak, jilid	12 Bulan	82,500,000	

9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BPKAD Kab. Kebum en	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	16,500,000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BPKAD Kab. Kebum en	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	16,500,000	
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BPKAD Kab. Kebum en	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	16,500,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BPKAD Kab. Kebum en	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	16,500,000	
11	Penyediaan makanan dan minuman	BPKAD Kab. Kebum en	Tersedianya jamuan rapat dan jamuan tamu	12 Bulan	132,000,000	Penyediaan makanan dan minuman	BPKAD Kab. Kebum en	Tersedianya jamuan rapat dan jamuan tamu	12 Bulan	120,000,000	
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BPKAD Kab. Kebum en	Terlaksananya akomodasi dan perjalanan dinas luar daerah	12 Bulan	165,000,000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BPKAD Kab. Kebum en	Terlaksananya akomodasi dan perjalanan dinas luar daerah	12 Bulan	165,000,000	
13	Penunjang Administrasi Perkantoran	BPKAD Kab. Kebum en	Terbayarnya honor PTT	12 Bulan	17,600,000	Penunjang Administrasi Perkantoran	BPKAD Kab. Kebum en	Terbayarnya honor PTT	12 Bulan	17,600,000	

14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	BPKAD Kab. Kebum en	Terlaksananya akomodasi dan perjalanan dinas ke dalam daerah	12 Bulan	16,500,000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	BPKAD Kab. Kebum en	Terlaksananya akomodasi dan perjalanan dinas ke dalam daerah	12 Bulan	16,500,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BPKAD Kab. Kebum en			1,010,000,000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BPKAD Kab. Kebum en			1,010,000,000	
15	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	BPKAD Kab. Kebum en	Pengadaan paket kendaraan dinas/operasional	1 Unit	120,000,000	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	BPKAD Kab. Kebum en	Pengadaan paket kendaraan dinas/operasional	1 unit	120,000,000	
16	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	BPKAD Kab. Kebum en	Pengadaan paket perlengkapan kantor	2 Paket	150,000,000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	BPKAD Kab. Kebum en	Pengadaan paket perlengkapan kantor	2 Paket	150,000,000	
17	Pengadaan peralatan gedung kantor	BPKAD Kab. Kebum en	Pengadaan paket peralatan gedung kantor	4 Paket	400,000,000	Pengadaan peralatan gedung kantor	BPKAD Kab. Kebum en	Pengadaan paket peralatan gedung kantor	4 Paket	400,000,000	

18	Pengadaan mebeleur	BPKAD Kab. Kebum en	Pengadaan paket pengadaan mebeleur	3 Paket	100,000,000	Pengadaan mebeleur	BPKAD Kab. Kebum en	Pengadaan paket pengadaan mebeleur	3 Paket	100,000,000	
19	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BPKAD Kab. Kebum en	Terpeliharanya gedung kantor DPPKAD	1 Unit	220,000,000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BPKAD Kab. Kebum en	Terpeliharanya gedung kantor DPPKAD	1 Unit	220,000,000	
20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	BPKAD Kab. Kebum en	Terpeliharanya mebeleur kantor DPPKAD	69 Unit	20,000,000	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	BPKAD Kab. Kebum en	Terpeliharanya mebeleur kantor DPPKAD	69 Unit	20,000,000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BPKAD Kab. Kebum en			55,000,000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BPKAD Kab. Kebum en			55,000,000	
21	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	BPKAD Kab. Kebum en	Pengiriman peserta bintek, workshop, pelatihan	1 tahun	55,000,000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	BPKAD Kab. Kebum en	Pengiriman peserta bintek, workshop, pelatihan	1 Tahun	55,000,000	
	Urusan Wajib	BPKAD Kab. Kebum en				Urusan Wajib	BPKAD Kab. Kebum en				

	Perencanaan Pembangunan	BPKAD Kab. Kebum en			30,000,000	Perencanaan Pembangunan	BPKAD Kab. Kebum en			30,000,000	
	Program pengembangan data/informasi	BPKAD Kab. Kebum en			30,000,000	Program pengembangan data/informasi	BPKAD Kab. Kebum en			30,000,000	
22	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	BPKAD Kab. Kebum en	Tersusunnya renja, , RKA, DPA, LKPJ/LPPD, Lakip	5 Doku men	30,000,000	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	BPKAD Kab. Kebum en	Tersusunnya renja, , RKA, DPA, LKPJ/LPPD, Lakip	5 Doku men	30,000,000	
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	BPKAD Kab. Kebum en				Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	BPKAD Kab. Kebum en				

	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	BPKAD Kab. Kebum en			3,540,000,000	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	BPKAD Kab. Kebum en			3,540,000,000	
23	Penyusunan standar satuan harga	BPKAD Kab. Kebum en	Tersusunnya peraturan bupati tentang indeks	1 Doku men	88,000,000	Penyusunan standar satuan harga	BPKAD Kab. Kebum en	Tersusunnya peraturan bupati tentang indeks	1 Doku men	88,000,000	
24	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	BPKAD Kab. Kebum en	Tersedianya rancangan Perda APBD dan Perbup APBD	2 Doku men	385,000,000	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	BPKAD Kab. Kebum en	Tersedianya rancangan Perda APBD dan Perbup APBD	2 Doku men	385,000,000	
25	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	BPKAD Kab. Kebum en	Tersedianya rancangan Perda PAPBD dan Perbup PAPBD	2 Doku men	330,000,000	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	BPKAD Kab. Kebum en	Tersedianya rancangan Perda PAPBD dan Perbup PAPBD	2 Doku men	330,000,000	

26	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	BPKAD Kab. Kebum en	Tersusunnya Raperda dan Raperbup Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD dan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD	3 Doku men	300,000,000	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawab a n pelaksanaan APBD	BPKAD Kab. Kebum en	Tersusunnya raperda tentang APBD	3 Doku men	300,000,000	
27	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	BPKAD Kab. Kebum en	Tersedianya pengolahan data barang milik daerah dan penilaian aset	2 Doku men	432,000,000	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	BPKAD Kab. Kebum en	Tersedianya pengolahan data barang milik daerah dan penilaian aset	2 Doku men	432,000,000	
28	Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kebum en	Pengadaan papan nama aset daerah; terbayarnya asuransi kendaraan dinas roda 4; terselesaikannya TPTGR	50 Buah; 3 Unit; 2 Kasus	300,000,000	Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kebum en	Pengadaan papan nama aset daerah; terbayarnya asuransi kendaraan dinas roda 4; terselesaikannya TPTGR	50 Buah; 3 Unit; 2 Kasus	300,000,000	

29	Penyusunan KUAPBD dan PPAS	BPKAD Kab. Kebum en	Tersusunya KUAPBD dan PPAS murni dan perubahan	2 Doku men	180,000,000	Penyusunan KUAPBD dan PPAS	BPKAD Kab. Kebum en	Tersusunya KUAPBD dan PPAS murni dan perubahan	2 Doku men	180,000,000	
30	Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan lain-lain daerah	BPKAD Kab. Kebum en	Penjualan BMD dan Pemanfaatan BMD	3 Obyek	100,000,000	Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan lain-lain daerah	BPKAD Kab. Kebum en	Penjualan BMD dan Pemanfaatan BMD	3 Obyek	100,000,000	
31	Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD Kab. Kebum en	Terlaksananya sinkronisasi data keuangan OPD dan Pengesahan SPJ Fungsional OPD	12 Bulan	250,000,000	Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD Kab. Kebum en	Terlaksananya sinkronisasi data keuangan OPD dan Pengesahan SPJ Fungsional OPD	12 Bulan	250,000,000	
32	Pengelolaan Belanja Langsung	BPKAD Kab. Kebum en	Tersedianya data penatausahaan keuangan daerah dan pembinaan bendahara OPD	1 Doku men	860,000,000	Pengelolaan Belanja Langsung	BPKAD Kab. Kebum en	Tersedianya data penatausahaan keuangan daerah dan pembinaan bendahara OPD	1 Doku men	860,000,000	

33	Pengelolaan Belanja Tidak Langsung	BPKAD Kab. Kebumen	Pengelolaan gaji PNSD dan rekonsiliasi jumlah pegawai; lancarnya pengelola hibah, bagi hasil, bantuan keuangan dan bantuan sosial	12 Bulan	315,000,000	Pengelolaan Belanja Tidak Langsung	BPKAD Kab. Kebumen	Pengelolaan gaji PNSD dan rekonsiliasi jumlah pegawai; lancarnya pengelola hibah, bagi hasil, bantuan keuangan dan bantuan sosial	12 Bulan	315,000,000	
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	BPKAD Kab. Kebumen			570,000,000	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	BPKAD Kab. Kebumen			570,000,000	
34	Penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota	BPKAD Kab. Kebumen	tersusunnya regulasi pengelolaan keuangan/aset daerah	1 Dokumen	110,000,000	Penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota	BPKAD Kab. Kebumen	tersusunnya regulasi pengelolaan keuangan/aset daerah	1 Dokumen	110,000,000	

35	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD Kab. Kebum en	Pembinaan dan evaluasi kinerja pengelolaan keuangan OPD	215 Unit	269,500,000	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah	BPKAD Kab. Kebum en	Pembinaan dan evaluasi kinerja pengelolaan keuangan OPD	215 Unit	269,500,000	
36	Penunjang Bantuan Keuangan/ Bantuan Sosial	BPKAD Kab. Kebum en	Terlaksananya pencairan bantuan keuangan/bantuan sosial,hibah,pembiayaan	14 OPD	190,500,000	Penunjang Bantuan Keuangan/ Bantuan Sosial	BPKAD Kab. Kebum en	Terlaksananya pencairan bantuan keuangan/bantuan sosial,hibah,pembiayaan	14 OPD	190,500,000	
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	BPKAD Kab. Kebum en			260,000,000	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	BPKAD Kab. Kebum en			260,000,000	
37	Pengendalian Kas Daerah	BPKAD Kab. Kebum en	Pengelolaan Dana APBD dan transver Daerah	12 kali	260,000,000	Pengendalian Kas Daerah	BPKAD Kab. Kebum en	Pengelolaan Dana APBD dan transver daerah	12 Kali	260,000,000	
	Statistik	BPKAD Kab. Kebum en			17,500,000	Statistik	BPKAD Kab. Kebum en			17,500,000	

	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	BPKAD Kab. Kebum en			17,500,000	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	BPKAD Kab. Kebum en			17,500,000	
38	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	BPKAD Kab. Kebum en	Tersusunnya data base pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah	1 Dokumen	17,500,000	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	BPKAD Kab. Kebum en	Tersusunnya data base pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah	1 Dokumen	17,500,000	
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 7,321,639,000	JUMLAH BELANJA LANGSUNG				Rp 7,321,639,000	
	TOTAL					TOTAL					

Sumber : Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018

BAB III

TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Program prioritas kebijakan pembangunan nasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diantaranya mengenai asset daerah, dan saat ini masih terus dilakukan sinkronisasi asset dan pemeriksaan asset ke Perangkat daerah agar diperoleh laporan asset yang akurat dan akuntabel sehingga akhirnya Kabupaten Kebumen bisa kembali memperoleh opini memperoleh opini WTP hasil audit Laporan Keuangan tahun 2015. Selain itu berkait dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan Permendagri 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah, di Kabupaten kebumen sendiri sudah dibuat Peraturan Bupati Kebumen nomor 20 tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual, untuk itu saat ini sedang disempurnakan system pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual.

B. Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD Kabupaten Kebumen

Keterkaitan Renja BPKAD Tahun 2018 dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021

Visi pembangunan Kabupaten Kebumen (Bupati Terpilih) Tahun 2016-2021 adalah :

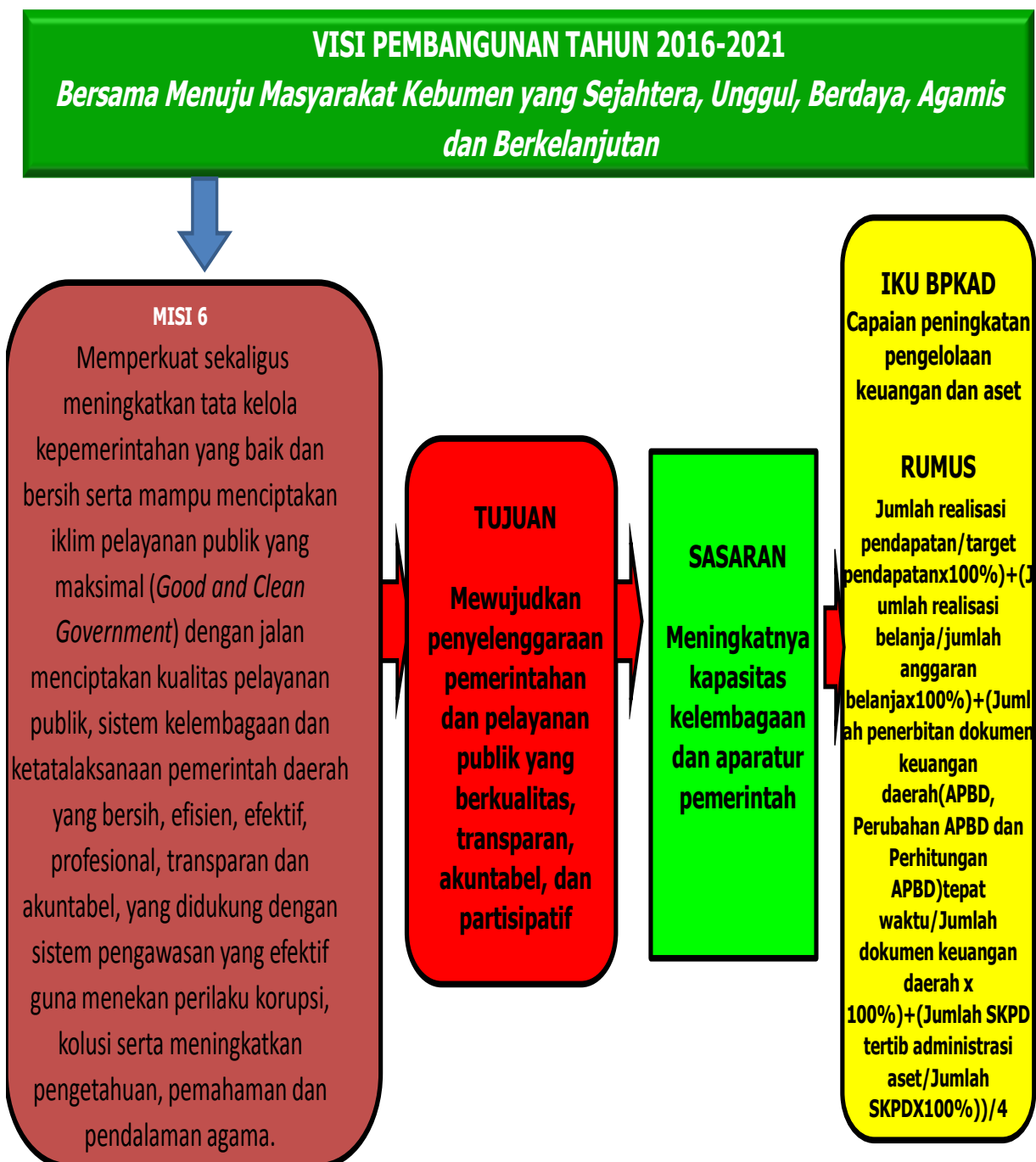
“BersamaMenuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
2. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat;
3. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-

- fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan;
 5. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; dan
 6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

Renja BPKAD Tahun 2018 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Strategis BPKAD Tahun 2016-2021 serta harus memperhatikan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, yang saat penyusunan Rencana Kerja ini dilaksanakan, kedua dokumen tersebut masih dalam tahapan penyusunan draftnya. Berdasarkan draft teknokratis RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, tugas pokok dan fungsi BPKAD yang tertuang melalui indikator kinerja utama (IKU) BPKAD, dalam pelaksanaan RPJMD adalah mendukung misi/agenda ke-6 Bupati terpilih tahun 2016-2021. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama BPKAD dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 3.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021 dengan Indikator Kinerja Utama BPKAD
Sumber : RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD Kabupaten Kebumen

Renja BPKAD Kabupaten Kebumen Tahun 2018 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman atau acuan bagi BPKAD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, rencana kerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan untuk mengevaluasi dalam meningkatkan kinerja lembaga BPKAD. Tujuan dan sasaran Renja BPKAD Kabupaten Kebumen Tahun 2018, seharusnya didasarkan atas Renstra BPKAD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 dan atas dasar isu-isu strategis penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.

C. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan membantu Bupati Kebumen dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Secara lebih lengkap mengenai Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 dapat dilihat dalam lampiran.

BAB IV PENUTUP

Perencanaan yang baik dan terukur adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam arti bahwa kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan pencapaian target pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati/dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan (*stakeholders*) melalui komitmen, konsistensi dan pengawalan yang tinggi serta dokumen ini dijadikan acuan dalam pelaksanaan proses-proses pembangunan selanjutnya. Selain itu, sikap, mental, semangat, kejujuran, dan disiplin seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) tetap harus dikedepankan.

Renja BPKAD Kabupaten Kebumen Tahun 2018 dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN, tetap memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Kebumen dan Renstra BPKAD).

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renja BPKAD Tahun 2018 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di BPKAD, baik dalam kerangka regulasi maupun anggaran, diperlukan keterpaduan dan sinkronisasi antarkegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antarprogram, dalam satu instansi dan antarinstansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan Forum Perangkat Daerah dibawah lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antarkegiatan, program maupun sektor.

Lampiran 1

Tabel
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen
Provinsi Jawa Tengah

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIAT AN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	20	05			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				7,321,639,000				8,302,217,700
					BELANJA LANGSUNG				7,321,639,000				8,302,217,700
2		1.20.05			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				17,500,000				19,250,000
2	14	1.20.05			Statistik				17,500,000				19,250,000
2	14	1.20.05	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				17,500,000				19,250,000
2	14	1.20.05	15	01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Tersusunnya data base pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	1 Dokumen	17,500,000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.17.500.000 ;	2 Dokumen	19,250,000
4		1.20.05			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				4,400,000,000				5,145,180,000
4	01	1.20.05			Perencanaan Pembangunan				30,000,000				32,500,000
4	01	1.20.05	15		Program pengembangan data/informasi				30,000,000				32,500,000

4	01	1.20.05	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya Renja, RKA, DPA, LKPJ/LPPD, Lakip	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	5 Dokumen	30,000,000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.30.000.000	5 Dokumen	32,500,000
4	02	1.20.05			Keuangan				4,110,000,000				4,782,680,000
4	02	1.20.05	17		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				3,540,000,000				4,176,205,000
4	02	1.20.05	17	02	Penyusunan standar satuan harga	Tersusunnya Peraturan Bupati tentang indeks standarisasi harga	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	1 Dokumen	88,000,000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.88.000.000	1 Dokumen	96,800,000
4	02	1.20.05	17	06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersedianya Rancangan Perda APBD dan Perbup APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	2 Dokumen	385,000,000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.385.000.000	2 Dokumen	423,500,000
4	02	1.20.05	17	08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Tersedianya Rancangan Perda Perubahan APBD dan Raperbup Perubahan APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	2 Dokumen	330,000,000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.330.000.000	2 Dokumen	363,000,000
4	02	1.20.05	17	10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya Raperda dan Raperbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	3 Dokumen	300,000,000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.300.000.000	3 Dokumen	363,000,000

4	02	1.20.05	17	16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Tersedianya pengolahan data barang milik daerah dan penilaian aset	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	2 Dokumen	432,000,000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.432.000.000	2 Dokumen	412,005,000
4	02	1.20.05	17	21	Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah	Terlaksananya pengadaan papan nama aset daerah, terbayarnya asuransi kendaraan dinas roda 4, terselesaikannya TPTGR	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	50 Buah; 3 Unit; 2 Kasus	300,000,000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.300.000.000	50 buah; 3 unit; 2 kasus	363,000,000
4	02	1.20.05	17	26	Penyusunan KUAPBD dan PPAS	Tersusunnya KUAPBD dan PPAS murni dan perubahan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	2 Dokumen	180,000,000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.180.000.000	2 Dokumen	217,800,000
4	02	1.20.05	17	30	Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan lain-lain daerah	Penjualan BMD dan Pemanfaatan BMD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	3 Obyek	100,000,000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.100.000.000 ;	3 Op	110,000,000
4	02	1.20.05	17	36	Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya sinkronisasi data keuangan SKPD dan Pengesahan SPJ Fungsional SKPD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	12 Kali	250,000,000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.250.000.000 ;	12 kali	302,500,000
4	02	1.20.05	17	40	Pengelolaan Belanja Langsung	Tersedianya data penatausahaan keuangan daerah dan pembinaan bendahara SKPD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	1 Dokumen	860,000,000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.860.000.000 ;	1 Dokumen	1,101,100,000

4	02	1.20.05	17	41	Pengelolaan Belanja Tidak Langsung	Pengelolaan gaji PNSD dan rekonsiliasi jumlah pegawai, lancarnya pengelola hibah, bagi hasil, bantuan keuangan dan bantuan sosial	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	12 Bulan	315,000,000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.315.000.000 ;	14000 orang 12 bulan	423,500,000
4	02	1.20.05	18		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota				570,000,000				606,475,000
4	02	1.20.05	18	05	Penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota	Tersusunnya regulasi pengelolaan keuangan / aset daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	1 Dokumen	110,000,000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.110.000.000 ;	1 Dokumen	115,500,000
4	02	1.20.05	18	07	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah	Pembinaan dan evaluasi kinerja pengelolaan keuangan SKPD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	215 Unit	269,500,000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.269.500.000 ;	215 Unit	296,450,000
4	02	1.20.05	18	08	Penunjang Bantuan Keuangan/ Bantuan Sosial	Terlaksananya pencairan bantuan keuangan/bantuan sosial, hibah, pembiayaan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	14 OPD	190,500,000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.190.500.000 ;	14 OPD;	200,025,000
4	05	1.20.05			Fungsi Lainnya				260,000,000				330,000,000
4	05	1.20.05	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				260,000,000				330,000,000

4	05	1.20.05	20	15	Pengendalian Kas Daerah	Pengelolaan dana APBD dan transfer daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	12 Kali	260,000,000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.260.000.000 ;	12 Kali	330,000,000
5		1.20.05			Program Pendukung Operasional SKPD				2,904,139,000				3,137,787,700
5	01	1.20.05			Program Pendukung Operasional SKPD				2,904,139,000				3,137,787,700
5	01	1.20.05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,839,139,000				1,997,287,700
5	01	1.20.05	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkelolanya surat menyurat	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	12 Bulan	5,775,000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.775.000	12 Bulan	6,353,000
5	01	1.20.05	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening telekomunikasi, air dan listrik	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	12 Bulan	440,000,000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.440.000.000	12 Bulan	484,000,000
5	01	1.20.05	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas/operasional	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	12 Bulan	249,150,000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.249.150.000	12 bulan	274,065,000
5	01	1.20.05	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya jasa pengelola kegiatan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	12 Bulan	463,314,000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.463.314.000 ;	12 Bulan	486,479,700
5	01	1.20.05	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	12 Bulan	66,000,000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.66.000.000 ;	12 Bulan	70,000,000

5	01	1.20.05	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Perbaikan peralatan kerja	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	12 Bulan	85,800,000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.85.800.000	12 Bulan	94,380,000
5	01	1.20.05	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	12 Bulan	82,500,000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.82.500.000	12 Bulan	90,750,000
5	01	1.20.05	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan penggandaan, cetak, jilid	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	12 Bulan	82,500,000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.82.500.000	12 Bulan	90,750,000
5	01	1.20.05	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	12 Bulan	16,500,000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.16.500.000	12 Bulan	18,150,000
5	01	1.20.05	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	12 Bulan	16,500,000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.16.500.000	12 Bulan	18,150,000
5	01	1.20.05	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya jamuan rapat dan jamuan makan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	12 Bulan	132,000,000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.132.000.000	12 Bulan	145,200,000
5	01	1.20.05	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya akomodasi dan perjalanan dinas luar daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	12 Bulan	165,000,000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.165.000.000	12 Bulan	181,500,000

5	01	1.20.05	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terbayarnya honor PTT	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	12 Bulan	17,600,000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.17.600.000 ;	12 Bulan	19,360,000
5	01	1.20.05	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya akomodasi dan perjalanan dinas ke dalam daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	12 Bulan	16,500,000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.16.500.000	12 Bulan	18,150,000
5	01	1.20.05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1,010,000,000				1,080,000,000
5	01	1.20.05	02	05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Pengadaan paket kendaraan dinas/operasional	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	1 Unit	120,000,000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.120.000.000 ;	1 unit	126,000,000
5	01	1.20.05	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan paket perlengkapan kantor	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	2 Paket	150,000,000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.150.000.000	2 Paket	165,000,000
5	01	1.20.05	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan paket peralatan gedung kantor	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	4 Paket	400,000,000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.400.000.000	4 Paket	420,000,000
5	01	1.20.05	02	10	Pengadaan mebeleur	Pengadaan paket pengadaan mebeleur	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	3 Paket	100,000,000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.100.000.000	3 Paket	105,000,000
5	01	1.20.05	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor BPKAD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	1 Unit	220,000,000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.220.000.000 ;	1 Unit	242,000,000

5	01	1.20.05	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur kantor BPKAD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	69 Unit	20,000,000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.20.000.000	94 unit	22,000,000
5	01	1.20.05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				55,000,000				60,500,000
5	01	1.20.05	05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Pengiriman peserta bintek, workshop, pelatihan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	1 Tahun	55,000,000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.55.000.000 ;	10 orang	60,500,000

Kebumen, 29 Mei 2017

KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

Dra. Hj. DYAH WORO PALUPI
NIP. 19641015 198903 2 006

